



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

**DESA WONOSARI KECAMATAN WONOSOBO
KABUPATEN WONOSOBO**



**PEMERINTAH DESA WONOSARI
KECAMATAN WONOSOBO
KABUPATEN WONOSOBO**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN.....	1
B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1
C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	2
BAB II BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	4
A. PROGRAM KERJA	4
B. REALISASI KEGIATAN	4
BAB III BIDANG PEMBANGUNAN DESA	5
A. PROGRAM KERJA	5
B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA	5
BAB IV BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.....	7
A. PROGRAM KERJA	7
B. REALISASI KEGIATAN	7
BAB V BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8
A. PROGRAM KERJA	8
B. REALISASI KEGIATAN	8
BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DESA	10
BAB VII KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI, DAN UPAYA YANG DITEMPUH.....	11
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.....	11
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	11
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	12
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	12
BAB VIII PENUTUP.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Dalam rangka melaksanakan kewajiban, wewenang dan hak Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2006 Bab. XIV Pasal 36 Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD serta memberitahukan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 Bab. II Pasal 4 Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu Kepala Desa pada setiap akhir tahun anggaran diwajibkan memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati Lewat Camat serta memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada BPD serta memberitahukan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018 disusun untuk memberikan laporan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2018.

B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

VISI :

“Menuju Desa Wonosari yang bersatu, maju, cerdas, sejahtera, dan bertaqwa”

MISI :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang Efisien, Efektif dan Transparan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta memetakan dan menitik beratkan pembangunan dengan skala prioritas.
3. Meningkatkan kesadaran akan adat istiadat, budaya dan menciptakan stabilitas keamanan.
4. Meningkatkan sumber potensi desa serta Sumber Daya Manusia yang berakhlaqul karimah.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Pembangunan Desa

1. Penguatan system perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan dengan keterlibatan dan pemberdayaan semua elemen masyarakat Desa Wonosari.
2. Strategi pembangunan yang diarahkan untuk membangun Desa Wonosari adalah pembagunan fisik materiil dan pembangunan spiritual jiwa manusia..

Arah Kebijakan Pembangunan Desa.

Selama pemerintahan antara tahun 2017 s/d 2022 Pemerintah Desa Wonosari sebagaimana tertuang dalam RPJMDes Wonosari, telah mengagendakan beberapa prioritas yang telah dicapai sebagaimana berikut;

1. Meningkatkan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan.

Sasaran yang akan dicapai :

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien serta transparan.
- Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat yang cepat dan tepat sesuai prosedur.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal penggunaan komputer dan teknologi informasi yang lain seperti pemanfaatan jaringan internet.

Arah kebijakannya adalah terwujudnya sebuah tata kelola pemerintahan desa yang cepat, tepat, akurat sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta memetakan dan menitik beratkan pembangunan dengan skala prioritas.

Sasaran yang akan dicapai :

- Perencanaan pembangunan yang melibatkan unsur terkecil di desa sehingga mempermudah bagi pemerintah desa dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
- Membangun perilaku pembangunan dan perilaku masyarakat yang berwawasan lingkungan.
- Mewujudkan proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang bijak sesuai hasil musbangdes yang telah dicapai secara transparan.

Arah kebijakannya adalah terwujudnya proses perumusan perencanaan, pelaksanaan, serta kebijakan dalam proses pengambilan keputusan yang transparan.

3. Meningkatkan kesadaran akan adat istiadat, budaya dan menciptakan stabilitas keamanan.

Sasaran yang akan dicapai :

- Membina SDM yang ada dengan cara menggalakkan masuk pendidikan formal/ non formal dari usia dini.
- Meningkatkan ketahanan masyarakat akan gangguan ketentraman dan ketertiban Desa.
- Meningkatnya nilai-nilai sosial, budaya kemasyarakatan, dan menjaga keharmonisan antar pribadi, antar kelompok, dan antar dusun.

Arah kebijakannya adalah pemerintah Desa Wonosari bersama masyarakat bersatu padu untuk mewujudkan masyarakat mandiri serta menciptakan stabilitas keamanan.

4. Meningkatkan sumber potensi desa serta sumber daya manusia yang berakhlakul karimah.

Sasaran yang akan dicapai :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggali potensi untuk kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan optimalitas pemanfaatan potensi desa yang ada bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- Meningkatkan penggalian sumber-sumber potensi yang ada di desa yang belum tersentuh bagi pendapatan asli desa demi pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakannya adalah mengoptimalkan / memanfaatkan sekaligus mencari sumber pendapatan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. PROGRAM KERJA

Program kerja Pemerintah Desa Wonosari Tahun 2018 seperti yang tercantum dalam RPJMDes dan RKP Desa 2018 serta dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 sejumlah Rp. 355.420.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	Rp 145.823.010
2	Kegiatan Operasional Lembaga Desa dan BPD	Rp 57.720.000
3	Kegiatan Penghasilan Tambahan	Rp 47.520.000
4	Kegiatan Pengisian Perangkat Desa	Rp 20.000.000
5	Kegiatan Operasional Perkantoran	Rp 20.356.990
6	Kegiatan Lanjutan Pembangunan Kantor	Rp 19.000.000
7	Kegiatan Workshop Siskeudes untuk Kades Sekdes dan Admin	Rp 9.000.000
8	Kegiatan Bintek Penyusunan RKPDes APBDes dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Kecamatan	Rp 2.000.000
9	Kegiatan Pelatihan PATEN	Rp 2.000.000
10	Kegiatan Workshop Pemdes dan BPD	Rp 20.000.000
11	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Gubernur	Rp 5.000.000
12	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan BPD	Rp 7.000.000

B. REALISASI KEGIATAN

Realisasi kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2018 sebesar Rp.321.518.000,-. Perubahan jumlah belanja dikarenakan ada kekosongan 3 orang perangkat, sehingga jumlah belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan pun berubah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	Rp 132.862.521
2	Kegiatan Operasional Lembaga Desa dan BPD	Rp 56.820.000
3	Kegiatan Penghasilan Tambahan	Rp 47.520.000
4	Kegiatan Pengisian Perangkat Desa	Rp 20.000.000
5	Kegiatan Operasional Perkantoran	Rp 20.315.565
6	Kegiatan Lanjutan Pembangunan Kantor	Rp 19.000.000
7	Kegiatan Workshop Siskeudes untuk Kades Sekdes dan Admin	Rp 9.000.000
8	Kegiatan Bintek Penyusunan RKPDes APBDes dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Kecamatan	Rp 2.000.000
9	Kegiatan Pelatihan PATEN	Rp 2.000.000
10	Kegiatan Workshop Pemdes dan BPD	Rp
11	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Gubernur	Rp 5.000.000
12	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan BPD	Rp 7.000.000

BAB III

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

A. PROGRAM KERJA

Program kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2018 sejumlah Rp.547.100.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan	Rp 8.000.000
2	Kegiatan Pembuatan Pagar Balai Desa	Rp 20.000.000
3	Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gudang Desa	Rp 15.000.000
4	Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan	Rp 50.000.000
5	Kegiatan Pembangunan Garasi Mobil Siaga	Rp 20.000.000
6	Kegiatan Pembangunan Jalan Makam	Rp 7.000.000
7	Kegiatan Pembangunan SPAL Rumah Tangga	Rp 40.000.000
8	Kegiatan Pembangunan Pavingisasi Jalan Lingkungan	Rp 35.000.000
9	Kegiatan Pembangunan Senderan	Rp 20.000.000
10	Kegiatan Pembangunan Drainase	Rp 40.000.000
11	Kegiatan Lanjutan Pavingisasi Jalan Lingkungan	Rp 25.000.000
12	Kegiatan Betonisasi dan Drainase Jalan Lingkungan	Rp 95.000.000
13	Kegiatan Swada dan Gotong Royong Jalan Lingkungan	Rp 6.400.000
14	Kegiatan Lanjutan Pembuatan Gapura Desa	Rp 15.000.000
15	Kegiatan Lanjutan Gedung Serba Guna	Rp 10.000.000
16	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Serba Guna	Rp 15.000.000
17	Kegiatan Swadaya dan Gotong Royong Makam	Rp 5.700.000
18	Kegiatan Bantuan RTLH Dusun Bangsri	Rp 50.000.000
19	Kegiatan Bantuan RTLH Dusun Kebumen	Rp 30.000.000
20	Kegiatan Bantuan RTLH Dusun Wonokerso	Rp 40.000.000

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Realisasi kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp. 547.100.000,-. Perubahan jumlah belanja dikarenakan ada perbedaan jumlah anggaran pengadaan mobil siaga dengan realisasi belanjanya. Adapun rincian realisasi kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan	Rp 8.000.000
2	Kegiatan Pembuatan Pagar Balai Desa	Rp 20.000.000

3	Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gudang Desa	Rp	15.000.000
4	Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan	Rp	50.000.000
5	Kegiatan Pembangunan Garasi Mobil Siaga	Rp	20.000.000
6	Kegiatan Pembangunan Jalan Makam	Rp	7.000.000
7	Kegiatan Pembangunan SPAL Rumah Tangga	Rp	40.000.000
8	Kegiatan Pembangunan Pavingisasi Jalan Lingkungan	Rp	35.000.000
9	Kegiatan Pembangunan Senderan	Rp	20.000.000
10	Kegiatan Pembangunan Drainase	Rp	40.000.000
11	Kegiatan Lanjutan Pavingisasi Jalan Lingkungan	Rp	25.000.000
12	Kegiatan Betonisasi dan Drainase Jalan Lingkungan	Rp	95.000.000
13	Kegiatan Swadaya dan Gotong Royong Jalan Lingkungan	Rp	6.400.000
14	Kegiatan Lanjutan Pembuatan Gapura Desa	Rp	15.000.000
15	Kegiatan Lanjutan Gedung Serba Guna	Rp	15.000.000
16	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Serba Guna	Rp	10.000.000
17	Kegiatan Swadaya dan Gotong Royong Makam	Rp	5.700.000
18	Kegiatan Bantuan RTLH Dusun Bangsri	Rp	50.000.000
19	Kegiatan Bantuan RTLH Dusun Kebumen	Rp	30.000.000
20	Kegiatan Bantuan RTLH Dusun Wonokerso	Rp	40.000.000

BAB IV

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. PROGRAM KERJA

Program kerja Pemerintah Desa Wonosari Tahun 2018 bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp.25.049.000,- yang terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	
1	Kegiatan Peringatan HUT RI	Rp	5.661.000
2	Kegiatan Peringatan Hari Jadi Wonosobo	Rp	5.388.000
3	Kegiatan Merdi Desa	Rp	5.000.000
4	Kegiatan Sosialisasi Bela Negara	Rp	5.000.000
5	Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Hukum	Rp	4.000.000

B. REALISASI KEGIATAN

Realisasi kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2017 sejumlah Rp.25.049.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	
1	Kegiatan Peringatan HUT RI	Rp	21.049.000
2	Kegiatan Peringatan Hari Jadi Wonosobo	Rp	5.388.000
3	Kegiatan Merdi Desa	Rp	5.000.000
4	Kegiatan Sosialisasi Bela Negara	Rp	5.000.000
5	Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Hukum	Rp	4.000.000

BAB V

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. PROGRAM KERJA

Program kerja Pemerintah Desa Wonosari Tahun 2018 bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 231.581.000,- yang terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Fasilitasi Kesenian Pertanu Dusun Kebumen	Rp 5.000.000
2	Fasilitasi Kesenian Dusun Bangsri	Rp 5.000.000
3	Fasilitasi Kesenian Dusun Wonokerso	Rp 5.000.000
4	Kegiatan Musyawarah Desa	Rp 3.500.000
5	Kegiatan Musyawarah Dusun	Rp 5.000.000
6	Fasilitasi KPMD	Rp 5.000.000
7	Kegiatan Operasional MADIN dan TPQ	Rp 6.000.000
8	Kegiatan Operasional GAPOKTAN	Rp 2.000.000
9	Kegiatan Fasilitasi Pemuda dan Olahraga	Rp 7.500.000
10	Kegiatan Pembelian Bibit Toga Dan Polybag	Rp 3.000.000
11	Insentif LPMD	Rp 1.920.000
12	Kegiatan Pelatihan Pengolahan Sampah	Rp 3.000.000
13	Kegiatan Peningkatan Informasi Masyarakat	Rp 4.000.000
14	Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Kurang Mampu dan Difabel	Rp 13.000.000
15	Kegiatan Bantuan Anak Sekolah Kurang Mampu	Rp 4.000.000
16	Kegiatan PPKBD	Rp 3.050.000
17	Kegiatan PKK	Rp 30.000.000
18	Kegiatan FKD	Rp 1.000.000
19	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat di PKD	Rp 8.500.000
20	Kegiatan Posyandu	Rp 22.000.000
21	Kegiatan KBKes	Rp 20.000.000
22	Kegiatan Penyertaan Modal Bumdes	Rp 35.611.000
23	Kegiatan Pelatihan Kebencanaan atau Pelatihan SAR	Rp 4.500.000
24	Kegiatan Kegiatan Peningkatan Hasil Pertanian	Rp 8.000.000
25	Kegiatan Peningkatan Hasil Perikanan	Rp 6.000.000
26	Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknologi Tepat Guna	Rp 20.000.000

B. REALISASI KEGIATAN

Adapun realisasi kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2017 sejumlah Rp.216.481.000,00- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Fasilitasi Kesenian Pertanu Dusun Kebumen	Rp 5.000.000
2	Fasilitasi Kesenian Dusun Bangsri	Rp 5.000.000
3	Fasilitasi Kesenian Dusun Wonokerso	Rp 5.000.000
4	Kegiatan Musyawarah Desa	Rp 3.500.000

5	Kegiatan Musyawarah Dusun	Rp	5.000.000
6	Fasilitasi KPMD	Rp	5.000.000
7	Kegiatan Operasional MADIN dan TPQ	Rp	6.000.000
8	Kegiatan Operasional GAPOKTAN	Rp	2.000.000
9	Kegiatan Fasilitasi Pemuda dan Olahraga	Rp	7.500.000
10	Kegiatan Pembelian Bibit Toga Dan Polybag	Rp	3.000.000
11	Insentif LPMD	Rp	1.920.000
12	Kegiatan Pelatihan Pengolahan Sampah	Rp	
13	Kegiatan Peningkatan Informasi Masyarakat	Rp	4.000.000
14	Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Kurang Mampu dan Difabel	Rp	13.000.000
15	Kegiatan Bantuan Anak Sekolah Kurang Mampu	Rp	4.000.000
16	Kegiatan PPKBD	Rp	3.050.000
17	Kegiatan PKK	Rp	30.000.000
18	Kegiatan FKD	Rp	1.000.000
19	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat di PKD	Rp	8.500.000
20	Kegiatan Posyandu	Rp	22.000.000
21	Kegiatan KBKes	Rp	7.900.000
22	Kegiatan Penyertaan Modal Bumdes	Rp	35.611.000
23	Kegiatan Pelatihan Kebencanaan atau Pelatihan SAR	Rp	4.500.000
24	Kegiatan Kegiatan Peningkatan Hasil Pertanian	Rp	8.000.000
25	Kegiatan Peningkatan Hasil Perikanan	Rp	6.000.000
26	Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknologi Tepat Guna	Rp	20.000.000
27	Kegiatan Peningkatan Kesehatan BUMIL	Rp	2.400.000
28	Kegiatan Posyandu	Rp	20.200.000
29	Kegiatan Desa Siaga	Rp	4.061.000
30	Kegiatan Kampung KB	Rp	18.700.000
31	Kegiatan Pembentukan dan Sarpras BUMDES	Rp	10.000.000
32	Kegiatan UP2K	Rp	1.000.000
33	Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Hukum	Rp	1.400.000

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Desa Wonosari berpedoman pada peraturan yang berlaku dan menjabarkan dalam bentuk Peraturan Desa dan penjabarannya, adapun peraturan-peraturan yang telah dibuat antara lain :

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 2 (hasil Mitra Desa).

BAB VII

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa selama tahun 2018 antara lain :

- Transparansi penyelenggaraan pemerintah desa kepada BPD dan masyarakat.
- Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas KKN.
- Pelayanan pemerintahan yang ramah dan dinamis

b. Permasalahan

- Kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan komputer baru 50 % dari jumlah perangkat yang ada.
- Pola kerja perangkat desa dan lembaga desa belum optimal.
- Kualitas layanan publik yang belum dapat menjamin terciptanya produk layanan publik yang dapat dijual ke masyarakat.
- Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber PADesa.

c. Upaya yang ditempuh

- Mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Membangun sinergi pemerintah desa BPD dan lembaga desa.
- Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pendapatan desa yang belum tersentuh bagi pendapatan asli desa dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan sumber-sumber potensi desa yang belum tersentuh bagi pendapatan
- Menetapkan target penerimaan PBB dari wajib pajak.
- Mengoptimalkan, efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada;
- Memperbaiki administrasi pemerintahan.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

a. Keberhasilan

- Penguatan sistem perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan dengan melibatkan dan memberdayakan semua elemen masyarakat.
- Terbangunnya perilaku pembangunan dan perilaku masyarakat yang berwawasan lingkungan.
- Tersusunnya rencana pembangunan jangka menengah desa yang dijabarkan dalam rencana kerja pembangunan.
- Tersedianya data base desa sebagai basis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

b. Permasalahan

- Ketidaktepatan dalam perencanaan prioritas pembangunan sehingga mengakibatkan pembangunan yang kurang tepat.
- Banyaknya pengangguran yang tidak mampu terakomodasi melalui kegiatan pembangunan.

- Rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap pengawasan pembangunan desa masih kurang.

c. Upaya yang ditempuh

- Perbaiki sistem sosialisasi agar lebih baik dan transparan
- Melalui musyawarah desa perlu evaluasi potensi peserta/kader ikut dalam menentukan kebijakan pembangunan, sehingga dimasa yang akan datang perumusan prioritas pembangunan lebih tepat sasaran.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat dalam perencanaan pembangunan.
- Sistem perencanaan dimulai dari kelompok terkecil di dusun dengan melibatkan semua elemen masyarakat.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Keberhasilan

- Terciptanya situasi kamtibmas sehingga masyarakat merasa nyaman.
- Terciptanya rasa handarbeni di masyarakat terhadap kondisi lingkungan.
- Terbentuknya forum komunikasi pemuda di tingkat dusun dan desa.
- Terbentuknya forum warga di masing-masing dusun sebagai wadah rembug dusun.

b. Permasalahan

- Banyaknya permasalahan sosial dimasyarakat terutama kenakalan remaja akibat pengaruh globalisasi.
- Kurangnya pengetahuan tentang hukum sehingga penyelesaian masalah kadang kurang matang.

c. Upaya yang ditempuh

- Penyuluhan tentang kesehatan dan keluarga berencana melalui kegiatan posyandu.
- Pembinaan kepemudaan melalui kegiatan penyuluhan kamtibmas, narkoba dan reproduksi remaja yang sehat.
- Peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui kegiatan Peringatan Hari Besar Islam.
- Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat.
- Penanggulangan dan penanganan terhadap gangguan kamtibmas.
- Deteksi dini terhadap potensi ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Keberhasilan

- Sistem perencanaan pembangunan melibatkan perempuan.
- Terbentuknya kelompok petani dan pelatihan
- Pelatihan bagi ibu rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
- Terbentuknya Lembaga Keuangan di tingkat desa melalui UPK, Gapoktan
- Terbentuknya kelompok masyarakat/paguyuban dusun dengan mengaktifkan kegiatan kepemudaan

b. Permasalahan

- Pluralisme penduduk dengan keterpengaruhan perkotaan sehingga mulai menggeser paradigma lama masyarakat desa yang mayoritas petani.

- Rendahnya dan tidak adanya kepastian harga komoditi pertanian sehingga masyarakat beralih sebagai buruh di kota.
- Pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan hasil bumi secara turun temurun, tidak adanya kreasi menyebabkan harga jual rendah.
- Bantuan kredit lunak dan mudah belum menyentuh UMKM.
- Menurunnya kegiatan gotong royong di masyarakat.
- Tingkat Partisipasi perempuan dalam pembangunan belum maksimal

c. Upaya yang ditempuh

- Mengadakan pelatihan kepada ibu tangga kerjasama dengan dinas instansi terkait.
- Mendorong masyarakat untuk meningkatkan jiwa sosial di masyarakat.
- Membentuk kelompok dan pembinaan kepemudaan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan gotong royong.
- Memberdayakan kelompok UMKM untuk berbadan hukum dan berijin.
- Mendorong UMKM untuk melakukan kreatifitas guna meningkatkan harga jual produk.
- Memfasilitasi bantuan modal peralatan kerja pedagang kecil.

BAB VIII

PENUTUP

Secara umum Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 1 tahun dari Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Diharapkan dengan laporan ini terbentuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bisa diterima oleh masyarakat. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril dan materiil sehingga Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wonosari Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Kami menyadari Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran membangun dari semua elemen masyarakat guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat kami nantikan.

Harapan kami Laporan ini bisa memberikan gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Wonosari, 9 Januari 2018

Kepala Desa Wonosari



SUPARDI